TUGAS AKHIR

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH ERA JOKO WIDODO TERHADAP SEKTOR INDUSTRI MOBIL PEDESAAN

Diajukan Oleh

Olky Surya Pramoldi Aryanto

14323046

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2019

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH ERA JOKO WIDODO TERHADAP SEKTOR INDUSTRI MOBIL PEDESAAN

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

OLKY SURYA PRAMOLDI ARYANTO

14323046

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH ERA JOKO WIDODO TERHADAP SEKTOR INDUSTRI MOBIL PEDESAAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Intrernasional

Pada Tanggal

22 JANUARI 2020

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A.,

Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.,	
2. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.,	
3. Hasbi Aswar, S.IP., M.A.,	

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Olky Surya Pramoldi Aryanto

No. Mahasiswa : 14323046

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Pemerintah Era Joko Widodo Terhadap Sektor Industri Mobil Pedesaan

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 23 Januari 2020

Yang menyatakan,

Olky Surya Pramoldi Aryanto

Scanned with CamScanner

HALAMAN PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahirabbil'alamin

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini untuk beberapa orang yang telah menyayangi saya selama ini, yaitu:

Istri saya Meiliana Triani, putra saya Aiden Falah Givoline Pramoldi Aryanto, dan Orang Tua saya.

Terima kasih untuk doa, nasihat, dukungan, kepercayaan, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya. Semoga dengan selesainya studi S1 ini akan membuka perjalanan baru bagi saya agar dapat menjadi orang yang berhasil dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan semoga dengan selesainya studi S1 ini juga bisa membuat semua orang yang mendukung saya bahagia serta bangga. Penulis ingin membuktikan kepada semua orang bahwa saya bisa menyelesaikan studi S1 ini, dan semoga kelak saya dapat sukses dan berhasil dan dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak saya kelak.

HALAMAN MOTO

"Veni, Vidi, Vici (I Came, I Saw, I Conquered)."

- Julius Caesar-

"It is during our darkest moments that we must focus to see the light."

-Aristotle-

"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts."

-Winston S. Churchill-

"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer."

-Bruce Lee-

"To know your enemy, you must become your enemy."

-Sun Tzu-

"*A painless lesson is also meaningless."*

-Lolita-

"Don't be negative, B+."

-Strygwyr the Bloodseeker-

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul "Analisis Kebijakan Pemerintah Era Joko Widodo Terhadap Sektor Industri Mobil Pedesaan" yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional dapat berjalan dengan lancar.

Sholawat serta salam tak lupa senantiasa penulis haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana telah membimbing umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang ini sesuai ketentuan Allah SWT.

Dengan penuh kesadaran, penulisan skripsi ini masih belum sempurna. Namun, penulis telah berusaha dengan kemampuan yang dimiliki semaksimal mungkin agar hasil dari penulisan skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak, terutama bagi para akademisi. Selama penulisan skripsi ini, penulis mengalami banyak kendala, tetapi dengan usaha yang tak henti-hentinya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang telah memberikan do'a, semangat, pengorbanan, dukungan, nasehat, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.

2. Istri dan anak saya yang telah memberikan do'a, semangat, dukungan, perhatian, motivasi, serta cinta dan sayang yang tak terhingga selama ini.
3. Bapak Enggar Furi Hardianto, S.IP., M.A., selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga Dosen Pembimbing Skripsi, yang selama ini telah memberikan banyak ilmu, membimbingan, nasihat, saran, dan telah membantu penulis.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang dengan sabar telah memberikan ilmu, motivasi, dan pengalamannya dari awal perkuliahan dampai dengan saat ini.
5. Teman-teman dan sahabat di Prodi Hubungan Internasional, yang selama ini telah berbagi kebersamaan, kerjasama, kesenangan dan kesedihan, serta bantuan dan do'anya. Saya selaku penulis berharap semoga tali persaudaraan kita tidak putus sampai di sini, Amin ya rabbal'alamin.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., selaku Dekan Fakultas Psiukologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
8. Staf Program Studi Hubungan Internasional, Staf Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Staf Perpustakaan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kemudahan dan bantuan segala urusan selama ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu selama ini dan selama penulisan skripsi ini.

Saya selaku penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selain itu, selama ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak kekeliruan dan kekurangan, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan pada masa yang akan datang dan khusunya bagi pengembangan ilmu pada bidang Hubungan Internasional, Amin ya rabbal'alamin.

Olky Surya Pramoldi Aryanto

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR..... ii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI.....x
BAB I PENDAHULUAN.....3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian.....8
1.4 Signifikansi 9
1.5 Lingkup Penelitian 9
1.6 Tinjauan Pustaka 10
1.7 Kerangka konsep atau landasan teori 13
1.7.1 *Determined Developmental Elite* 14
1.7.2 *A Powerful, Competent, and Insulated Economic Bureaucracy*.....14
1.7.3 *Developmental States and Civil Society* 15
1.7.4 *The Effective Management of Non-State Economic Interest* 15
1.7.5 *Repression, Legitimacy, and Performance* 16
1.8 Metode Penelitian.....17
BAB II.....20
2.1 *Determined Developmental Elite* 20
2.2 Relative Autonomy of The Developmental State 26
BAB III 31
3.1 *A Powerful, Competent and Insulated Economic Bureaucracy*.....31
3.2 *Developmental States and Civil Society*.....37
BAB IV 41
4.1 *The Effective Management of Non-State Economic Interest*.....41

4.2 *Repression, Legitimacy and Performance* 44

BAB V 49

DAFTAR PUSTAKA 55

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ABSTRAK

Industri otomotif merupakan industri yang cukup menjanjikan yang dimana sudah menjadi hal umum apabila negara berkembang menginginkan adanya mobil nasional seperti yang telah dimiliki oleh negara-negara maju. Indonesia sebagai negara yang telah mengalami kegagalan dalam membangun mobil nasional, memiliki keinginan untuk membangun kembali mobil nasional tersebut melalui jenis mobil pedesaan yang dimana adalah mobil multifungsi yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai alat pembantu pekerjaan mereka.Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah agar industri mobil pedesaan dapat berkembang menjadi industri yang dapat menyaingi industri-industri otomotif global dengan menggunakan indikator dari teori *Developmental State* untuk menganalisis apakah Indonesia sudah memenuhi semua indikator dalam perjalanan mencapai tujuan negara.

Kata kunci: Indonesia, Industri otomotif, Mobil Pedesaan, Mobil Multifungsi, AMMDes, Joko Widodo, *Developmental State*

ABSTRACT

The automotive industry is a promising industry which has become common when developing countries want a national car like those of developed countries. Indonesia as a country that has failed in building a national car, has the desire to rebuild the national car through a type of rural car which is a multifunctional car that can be used by the people of Indonesia as a tool for their work. Therefore, it is necessary to have policy support from the government so

that the rural car industry can develop into an industry that can rival the global automotive industries by using indicators from the Developmental State theory to analyze whether Indonesia has fulfilled all the indicators on its way to achieving the country's goals.

Key words: Indonesia, Automotive Industries, Rural Car, Multifunctional car, AMMDes, Joko Widodo, Developmental State

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi industri otomotif yang tumbuh dengan pesat, menjadikan persaingan di antara produsen otomotif dunia semakin ketat dalam menciptakan produk-produk yang dapat memenuhi selera pasar serta mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli. Produsen-produsen otomotif dunia seperti Honda, Toyota, Volkswagen, Ford, Jaguar, Rolls-Royce, Chevrolet, Dodge, Nissan dan Hyundai merupakan industri otomotif luar negeri yang telah dianggap berhasil dalam pengembangan industri dan penjualan produk ke berbagai negara di dunia.

Persaingan di antara para pemain lama industri otomotif dunia tersebut telah menekan industri otomotif dalam negeri Indonesia hingga saat ini. Industri-industri luar negeri yang menguasai pangsa pasar Indonesia di antaranya Toyota sebesar 31%, Daihatsu 17,3%, Honda 14,1%, Mitsubishi Motor 12,4% dan Suzuki 10,25% semuanya pada tahun 2018 (Mola, 2019). Angka-angka di atas menunjukkan betapa kecilnya peluang pasar yang dimiliki oleh industri otomotif domestic yang memiliki keinginan untuk dapat membuat industri otomotif nasional. Pemerintah Indonesia kemudian berupaya untuk bagaimana caranya menaikkan kembali industri otomotif domestik yang kalah saing tersebut. Berbagai perkembangan yang dilakukan sejak 1969 kemudian dilakukan pembaharuan industri, hingga mengeluarkan kebijakan industri mobil pedesaan

dengan acuan industri ini memiliki peluang untuk dikembangkan untuk dapat bersaing dalam dunia global.

Industri otomotif Indonesia berawal dari industri suku cadang untuk mobil-mobil yang diimpor secara utuh atau *Completely Build Up* atau CBU maupun *Completely-Knocked Down* atau CKD yang terjadi pada tahun 1969. Lalu pada tahun 1971 produsen otomotif dari Jepang mulai berdatangan seperti Mitsubishi Motors yang dimiliki izin pemegang mereknya oleh PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan telah terjual sebanyak 50.000 unit pada tahun tersebut. Melihat banyaknya kendaraan yang diimpor secara CBU, pemerintah mulai mengajukan kebijkan pengurangan impor kendaraan CBU pada tahun 1974 dengan syarat bahwa perusahaan yang mengimpor kendaraan CBU diharuskan dapat melakukan perakitan sendiri dan melakukan impor utuh hanya pada mobil yang dirasa memiliki kompleksitas yang belum dapat dikerjakan atau dirakit di Indonesia (Gaikindo, 2018).

Pada tahun 1976 Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan terkenal yang disebut "Program Penanggalan Komponen", dengan tujuan salah satunya adalah mengenakan pajak impor tinggi bagi kendaraan yang belum menggunakan suku cadang dalam negeri. Kemudian program ini dikembangkan menjadi "Program Insentif" yang telah disebutkan di atas, dengan harapan bisa semakin meningkatkan produksi otomotif mulai dari produk bermotor hingga ke suku cadang dan lain-lain (Kemenkeu, 2013).

Mobil Nasional atau Mobnas adalah mobil yang diproduksi oleh negara dan diakui sebagai produk dalam negeri untuk digunakan oleh rakyat negara

tersebut dan diekspor ke negara lainnya. Industri otomotif suatu negara yang mengembangkan produksi mobil secara mandiri dan dapat diterima pasar, dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang luar biasa dan pemasukan APBN yang besar bagi negara tersebut. Sebagai contoh penjualan Mobnas asal Malaysia dengan merek Proton pada tahun 1987 memasarkan hingga 50.000 unit mobil di Malaysia, meski kemudian tergerus dengan mobil pabrikan luar dan hanya menguasai 14% pangsa pasar otomotif di tahun 2017 (Eka S, 2018).

Pada tahun 1996 pemerintah mempercepat Program Insentif terkait Mobnas, di mana pemerintah memberikan potongan maupun kebebasan dari bea impor dengan syarat komponen dari perusahaan otomotif mesti mengandung komponen lokal 20% di tahun pertama, 40% di tahun kedua dan 60% di tahun ketiga otomotif tersebut diimpor ke Indonesia (Gaikindo, 2018).

Keinginan Indonesia untuk memiliki mobil nasional semakin kuat semenjak adanya kerja sama antara Indonesia dengan industri otomotif dari Inggris yaitu Rover yang pada saat itu dikerjakan oleh B.J Habibie yaitu konsep mobil Maleo. Dengan mengambil contoh dari Rover Metro, Maleo mencoba mengembangkan kendaraan dengan basis dari Rover Metro dan pada saat itu pemerintah Indonesia berencana mengimpor Rover Metro ke Indonesia untuk dilakukan proyek Rancangan Maleo yang pada saat itu akan dirancang oleh PT. Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS) (Kuswaraharja, 2015).

Pemerintah Indonesia menginstruksikan Kementerian perdagangan (Kemendag) melalui Inpres Nomor 2 Tahun 1996 agar mewujudkan industri Mobnas dan sempat membangun industri mobil nasional dengan memproduksi

mobil yang memiliki merek Timor yang ditangani oleh Tommy Suharto, dan juga merek Maleo yang ditangani oleh B.J Habibie (Alamsyah, 2015). Namun, di perjalanan proyek ini berhenti karena krisis moneter dan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepemimpinan.

Setelah beberapa tahun mengalami pergantian konsep mobil nasional seperti Timor dan Maleo, Indonesia merasa perlu adanya pergantian fokus yang sebelumnya fokus kepada mobil nasional menjadi mobil pedesaan yang memiliki fungsi dan spesifikasi yang berbeda. Menurut Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian pada tahun 2016 menyatakan bahwa Indonesia masih berkutat dengan industri kendaraan angkutan berpenumpang dan sangat memiliki kesempatan untuk melakukan pengembangan terhadap mobil pedesaan yang memiliki fungsi utama untuk membawa hasil pertanian (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2016). Hal ini dianggap memiliki daya saing jual di dalam dan luar negeri yang cukup menjanjikan karena kurangnya produsen otomotif dunia yang melirik ke dalam sektor tersebut. Oleh karena itu hal tersebut dapat membuat Indonesia dapat bersaing dengan produsen otomotif luar yang tidak terlalu memfokuskan industrinya pada sektor tersebut sekaligus meningkatkan perindustrian otomotif Indonesia.

Wacana untuk pembuatan mobil pedesaan sudah dikemukakan pada tahun 2010 dengan spesifikasi mesin di bawah 1.000 cc dan dapat mengangkut barang dan penumpang seperti yang disampaikan oleh Budi Darmadi selaku Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi pada tahun tersebut. Pemerintah bekerjasama dengan Institut Otomotif Indonesia (IOI) dan menunjuk Made Dana

Tangkas selaku Presiden dari IOI sebagai koordinator pengembangan mobil pedesaan (Nayazri, 2016).

Melihat adanya kesempatan untuk dapat bersaing, beberapa perusahaan dalam negeri pun turut serta dalam mengembangkan mobil pedesaan seperti perusahaan PT. Fin Komodo, CV. Karya Hidup Sentosa, dan PT. Astra Otoparts Tbk. (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, -). Beberapa contoh mobil yang telah dibuat antara lain adalah Tawon dan AMMDes atau Alat Mekanis Multiguna Pedesaan yang telah dipamerkan pada acara tahunan GIIAS atau Gaikindo Indonesia International Auto Show pada tahun 2018 (Deny, 2018).

Pemerintah Indonesia berupaya memberikan wadah bagi produsen domestik untuk dapat bertahan dalam persaingan inustri otomotif global, dengan cara mengeluarkan kebijakan untuk mendukung pembuatan produk baru berupa mobil pedesaan. Dengan bantuan dukungan kebijakan dan kebijakan berupa proteksi terhadap produk tersebut sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi industri lokal dan dapat juga bersaing di dunia. Proteksi ini perlu diberikan kepada industri mobil pedesaan karena industri ini masih baru dan perlu berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat dapat melindungi perkembangan industri ini sehingga kedepannya laik untuk dapat bersaing dengan industri otomotif dunia.

Untuk dalam negeri sendiri, dengan adanya program Industri mobil pedesaan ini bisa memberikan hasil yang positif bagi ekonomi negara, sejalan juga dengan kepentingan berupa profit bagi berbagai aktor bisnis yang teribat, dan juga diharapkan dapat membantu masyarakat pedesaan dan industri mikro kecil

menengah agar dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehari-hari, seperti bertani, berkebun dan meraih hasil panen yang efektif dengan kendaraan yang harganya terjangkau sehingga bisa menekan biaya (Purnama, 2017).

Sebagai salah satu sektor industri yang mendapatkan cukup banyak perhatian, membuat mobil pedesaan menjadi salah satu sektor yang menarik untuk diteliti. Dimulai dari cukup banyaknya perusahaan domestik yang berusaha mengembangkan produk di sektor ini hingga dukungan yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri mobil pedesaan, menunjukkan potensi yang cukup baik bagi mobil pedesaan. Untuk itu, penelitian ini akan berfokus pada upaya pemerintahan Indonesia, terutama pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai pemangku jabatan saat ini, terkait dengan pengembangan industri kendaraan pedesaan untuk pengembangan industri otomotif lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana dorongan kebijakan pemerintah terhadap sektor industri mobil pedesaan pada masa Presiden Joko Widodo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan terkait mobil pedesaan di masa Presiden Joko Widodo dan,
2. Untuk mengetahui hasil perkembangan implementasi kebijakan mobil pedesaan di era Presiden Joko Widodo

1.4 Signifikansi

- Untuk memperkaya studi mengenai ekonomi politik indonesia di sektor otomotif dan sekaligus memperkaya studi hubungan internasional.

- Melihat bagaimana Pemerintah Indonesia sebagai aktor dalam merespon kondisi pasar otomotif global.

- Untuk mengetahui implementasi strategi mobil pedesaan yang dijakalankan oleh Indonesia sebagai salah satu kebijakan pengembangan industri otomotif nasional.

1.5 Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada:

1. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, mengingat pada saat presiden Joko Widodo kebijakan mobil nasional dilaksanakan.
2. Jenis industri otomotif yang dibahas hanya industri mobil pedesaan. Hal ini karena merupakan pengembangan sektor industri otomotif baru di Indonesia dan mobil pedesaan dianggap berpotensi untuk meningkatkan persaingan industri domestik terhadap industri otomotif global sehingga memberikan keuntungan ekonomi bagi negara.
3. Penelitian ini hanya membahas kebijakan pemerintah terkait dengan industri mobil pedesaan, tidak sampai melihat dampak implementasinya serta perkembangannya. Hal ini untuk mengurangi melebarnya pembahasan di karenakan fokus utama adalah membahas kebijakan pemerintah saja.

1.6 Tinjauan Pustaka

Menurut Toto Suharto dalam jurnalnya yang berjudul 'Kebijakan Ekonomi Global di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan teori, problematika dan Interaksi Kebijakan Perdagangan dan Industrialisasi' menyatakan bahwa negara-negara berkembang umumnya berusaha mengembangkan industri dengan hasil produksi yang pendek dan menghemat devisa. Karena itu, pilihannya lebih pada pengembangan Industri Substitusi Impor (ISI), yang sering kali terbentur jika karena terjadi kejenuhan pada pasar dalam negeri dan *barrier* perdagangan di laur negeri. Perkembangan tahap awal industri berjalan cepat kemudian mengalami perlambatan ketika subsidi industri tersebut dicabut karena dianggap sebagai *barrier* yang dilarang dalam pasar global (Suharto, 2002, pp. 91-110). Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana Pemerintah Joko Widodo dalam mengeluarkan kebijakan untuk mendorong industri mobil pedesaan ini berkembang menjadi lebih baik sehingga dapat diterima di pasar global.

Dalam jurnal berjudul 'Implementasi AEC dalam Peningkatan Jaringan Produksi Regional ASEAN: Studi kasus industri otomotif' yang ditulis oleh Enggar Furi Herdianto membahas terkait bagaimana integrasi ekonomi yang diupayakan oleh ASEAN Economic Community (AEC) termasuk industri otomotif di negara-negara anggota. Upaya integrasi lebih lanjut ini akan mempermudah perputaran penjualan industri otomotif tiap negara termasuk Indonesia, meski kemudian hambatan yang muncul selanjutnya adalah tiap negara pasti akan berupaya melindungi jalur perdagangan industri nasional masing-masing (Herdianto, 2016, pp. 112-113). Dalam hal ini saya melihat apa saja

upaya-upaya Pemerintahan Joko Widodo untuk menjadikan integrasi ekonomi ini sebagai peluang bagi perkembangan industri dan penjualan mobil pedesaan.

Dalam artikel berjudul 'Perkembangan Komponen Otomotif di Indonesia' yang ditulis oleh Widy Haryono di Kemendag, menyatakan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi industri otomotif dunia hal ini juga berpengaruh di Indonesia. Perkembangan ini termasuk diantaranya komponen mobil dan juga suku cadang yang pada tahun 2013 mencatat nilai ekspor sejumlah 1,42 milyar USD. Dalam artikel ini, Haryono menyebutkan bahwa adanya peningkatan kebutuhan dunia akan komponen-komponen otomotif sehingga hal ini dapat dianggap sebagai sebuah peluang bagi negara untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pemerintah melalui perusahaan seperti Astra Tbk. dan ABAI menjadi salah satu produsen pelopor menuju pasar global (Haryono, 2014). Haryono melihat mobil pedesaan juga dapat menyentuh pasar global karena masih belum banyaknya industri luar yang berfokus pada segmen tersebut.

Dalam Jurnal berjudul 'Industri Mobil Nasional : Perspektif Berlian Porter' yang ditulis oleh Elvy Maria Manurung, menyatakan bahwa saat ini Indonesia belum memiliki, atau masih mencari dan menemukan 'berlian' industri dalam negeri yang unggul dan kompetitif. Namun, Indonesia sendiri dalam hal ini industri otomotif memiliki potensi untuk mengejar ketertinggalan atau menciptakan sesuatu yang bisa menimbulkan keunggulan kompetitif dalam pasar global dan hal itu adalah mobil pedesaan (Manurung, 2012). Saya melihat ada peluang untuk mobil pedesaan ini menjadi 'berlian' industri otomotif Indonesia dikarenakan masih belum banyak yang melirik pangsa pasar ini di dunia global.

Terkait kerja sama yang mesti dibangun antara negara dan aktor non negara dalam hal ini swasta, Bambang Susantono & Mohammed Ali Berawi dalam jurnal yang berjudul 'Perkembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta di Indonesia'. Menyatakan bahwa sistem KPS (Kerjasama Pemerintah-Swasta) di Indonesia diyakini sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai bidang dari proyek tersebut. Dengan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dapat menjamin investasi dapat berjalan dengan baik pada proyek tersebut (Susantono & Berawi, 2012).

Dalam hal ini penulis akan mencoba menganalisis bagaimana kerja sama yang dibangun antara pemerintah masa Presiden Joko Widodo dengan aktor negara dalam proyek industri otomotif mobil pedesaan. Dengan adanya kontribusi dari pustaka-pustaka dan penelitian terdahulu yang ada di tinjauan pustaka ini diharapkan membantu penulis dalam menggambarkan keadaan yang saat ini dan terjadi terkait industri mobil pedesaan. Hal ini menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji industri mobil pedesaan dalam lingkup kebijakan era Pemerintahan Joko Widodo terkait industri otomotif. Meski begitu, masih belum banyak ditelitinya sektor industri mobil pedesaan di Indonesia kemudian mendorong penulis untuk menjalankan penelitian di sektor tersebut, yaitu mengenai kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait dengan perkembangan sektor industri mobil pedesaan di Indonesia.

1.7 Kerangka konsep atau landasan teori

Dalam tulisan ini, penulis mencoba menerapkan konsep *developmental state* dalam menganalisis peran pemerintahan Joko Widodo dalam mengembangkan industri mobil pedesaan agar dapat bersaing di dunia internasional. Teori ini sangat cocok untuk menjadi landasan dari analisis ini karena Indonesia yang merupakan negara berkembang dapat menjadi contoh dari konsep yang dikemukakan oleh Adrian Leftwich yang dimana Leftwich mengungkapkan bahwa peran pemerintah dibutuhkan untuk dapat membantu pihak non-pemerintah dalam memajukan perekonomian negaranya.

Seperti yang disampaikan oleh Leftwich, sebuah negara yang ingin mencapai tujuannya itu haruslah memiliki kemampuan dan kekuasaan politik yang kuat, sumber daya yang mumpuni, dan juga memili arah yang jelas sehingga dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Peran negara inilah yang menjadi faktor penting perkembangan dan pembangunan negara tersebut, jika peran negara kurang aktif maka pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar dan semestinya. Pemerintah mempunyai kekuatan untuk mendorong pembangunan negara dengan cara menggerakkan semua aspek dan aktor di dalam negaranya untuk dapat mencapai tujuan pembangunan.

Ada beberapa indikator yang dikemukakan Leftwich dalam teori *developmental state* yang telah berhasil dijalankan oleh beberapa negara di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan yaitu:

1.7.1 *Determined Developmental Elite*

Determined Developmental Elite merupakan indikator yang dilihat melalui siapa saja aktor-aktor/elit-elit atau kelompok orang-orang yang terlibat dalam pengembangan sektor industri otomotif yang ada di Indonesia terutama berkaitan dengan industri mobil pedesaan. Dilihat dari beberapa program mobil nasional yang selama ini telah berjalan, beberapa dianggap tidak berjalan dengan baik karena elit-elit yang berada di sektor swasta dan pemerintah tidak sejalan dalam hal pembangunan. Di masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah dalam hal ini Kemenperin, Gaikindo, IOI dan lainnya sebagai pihak swasta saling bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan dalam hal industri otomotif Indonesia. Sehingga program seperti mobil pedesaan yang telah dikembangkan oleh Kementrian Perindustrian dan perusahaan swasta seperti PT. Astra Otoparts Tbk. dalam mengembangkan AMMDes bisa berjalan dengan lancar hingga saat ini.

1.7.1 *Relative Autonomy of the Developmental State*

Masing-masing pemerintahan beserta jajaran elit tiap negara memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan terkait industri, namun kewenangan tersebut bersifat relatif dan seringkali memiliki batasan. Dalam hal ini seberapa jauh kewenangan pemerintah Indonesia di masa Presiden Joko Widodo beserta elit pemerintahan lainnya mengeluarkan kebijakan yang bersifat intervensi hingga dapat mempengaruhi aktor non-negara dan masyarakat untuk mendukung kebijakan industri mobil pedesaan.

1.7.2 *A Powerful, Competent, and Insulated Economic Bureaucracy*

Dalam *Developmental State,* akan selalu ada Badan negara yang ditunjuk untuk menjalankan strategi ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan industri

negaranya. Hal ini agar Negara mencapai tujuan pembangunan dengan mengeluarkan kebijakan yang sesuai dan kebijakan ini harus didukung oleh orang-orang yang kompeten dalam Badan negara yang memiliki pondasi kuat. Saya akan menjabarkan badan negara apa yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjalankan kebijakan tersebut dan menjamin kelancarannya.

1.7.3 *Developmental States and Civil Society*

Untuk melihat bagaimana strategi *Developmental State* ini berjalan dapat juga dilihat dari hubungan negara dengan masyarakat. Seringkali kebijakan diambil bersifat *top-down* atau masyarakat tidak turut andil dalam perumusan kebijakan, lebih diserahkan kepada elit politik dan aktor industri swasta. Saya akan menjabarkan bagaimana pengambilan kebijakan ini dibuat dan bagaimana kaitannya dengan peran dari masyarakat atas kebijakan tersebut.

1.7.4 *The Effective Management of Non-State Economic Interest*

Di dalam strategi *Developmental State* terdapat upaya penekanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi dari aktor-aktor non-negara. Tekanan ini bisa berupa kebijakan-kebijakan yang malah dianggap merugikan kepentingan ekonomi aktor non-negara, namun di jangka panjang mampu memberikan keuntungan bagi pengembangan domestik sektor ekonomi yang didorong pemerintah. Seperti contoh Proton di tahun 1980-an dengan kelebihan yang ditawarkan oleh Pemerintah Malaysia adalah harga yang murah dibanding pesaing lain karena faktor pajak dinaikkan. Hal ini juga akan dilihat apa saja kebijakan pemerintah Indonesia yang menekan aktor-aktor non-negara namun berguna untuk perkembangan dari industri mobil pedesaan tersebut.

1.7.5 *Repression, Legitimacy, and Performance*

Di dalam hal ini melihat terkait bagaimana strategi *Developmental State* mengakui adanya kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintah di dalam mendorong pengembangan sektor perekonomian yang ingin ditingkatkan. Di dalam kebijakan represif ini, memang akan memberikan tekanan dan terkadang menimbulkan adanya tentangan dari masyarakat. Namun, fokus dari poin ini adalah bagaimana kebijakan represif tersebut pada perkembangannya mampu berjalan yang kemudian menunjukkan adanya legitimasi terkait kebijakan yang dipaksakan pemerintah. Selain itu, legitimasi lainnya adalah dengan semakin meningkatnya sektor perekonomian yang didorong oleh pemerintah. Dalam kasus ini, kebijakan represif pemerintah seperti yang dijelaskan di poin-poin sebelumnya menunjukkan adanya upaya represif kepada masyarakat. Meski begitu, peraturan tersebut terlegitimasi dengan masih berjalannya kebijakan tersebut, serta dengan bukti meningkatnya pengembangan industri mobil pedesaan di Indonesia berkat paksaan yang diberikan melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna melindungi serta mendorong pengembangannya. (Leftwich, 1995, hal. 405-420). Hal di atas adalah gambaran akhir dari Leftwich terhadap sebuah sikap represi negara pada masa tersebut. Namun pada saat sekarang ini tekanan terkadang perlu diberikan oleh pemerintah guna legitimasi kebijakan kepada berbagai aktor non-negara sehingga tujuan pengembangan industri otomotif dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk melihat performa dan keberhasilan dari kebijakan tersebut bisa dilihat dari berbagai indikator-indikator di lapangan seperti pengembangan produksi dan hasil penjualan.

Melihat poin-poin yang telah dijabarkan di atas, teori *Developmental State* merupakan teori yang tepat digunakan dalam penelitian ini yang di mana peran dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo berperan penting dalam peningkatan pembangunan negara khususnya dalam hal industri otomotif mobil pedesaan. Selain itu, teori *developmental state* juga dapat menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat meningkatkan perekonomian negara dari tahap masyarakat dalam negeri hingga mencapai pasar global.

Melihat proses kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menangani industri otomotif mobil pedesaan dengan mengajak beberapa perusahaan swasta untuk dapat saling membantu dalam mengembangkan industri mobil pedesaan agar dapat bersaing secara nasional dan juga secara internasional. Hubungan yang terjalin di antara pemerintah dan pihak swasta dapat meningkatkan perekonomian negara dan mempercepat proses pembangunan Indonesia dalam bidang industri otomotif.

1.8 Metode Penelitian

- Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis analisis kualitatif dan deskriptif yaitu menggunakan studi pustaka terhadap obyek maupun subyek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan akan berkaitan dengan topik yang akan ditinjau yakni bagaimana perkembangan industri otomotif berupa Mobil Nasional atau Mobnas di indonesia, hingga berfokus di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berupaya mendorong perkembangan Mobnas tersebut.

Rumusan masalah ini nantinya akan dianalisis dan dijelaskan dengan teori *Developmental State* dari Adrian Leftwitch sehingga dapat ditemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas.

- Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah Pemerintah indonesia selaku implementator kebijakan dari mobil pedesaan dan kebijakan yang diambil dan diimplementasikan untuk mencapai tujuan tersebut adalah objeknya. Untuk membantu menganalisis hal tersebut dan menjawab rumusan masalah, penulis menganalisis berdasarkan teori *Developmental State.*

- Alat pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah dengan mengambil dokumen atau literatur resmi yang terpercaya dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Sebagian besar buku-buku yang diambil adalah buku-buku rujukan terhadap proses penelitian terkait kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi dalam mendorong sektor industri mobil pedesaan untuk dapat bersaing dalam pasar global.

- Proses penelitian

Proses penelitian menyangkut perencanaan yang akan dilakukan dalam penelitian yang mana hal tersebut dijadikan sebagai panduan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa tahap yang akan dilakukan adalah:

1. Pra Riset mencakup kegiatan untuk persiapan riset. Ini termasuk: melihat hasil laporan penelitian, membaca bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian.

2. Mengumpulkan dan mengolah data-data yang bersumber dari tulisan-tulisan akademik seperti jurnal, buku-buku pendukung, laman resmi, dan juga berita-berita yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya didasarkan pada reputasi kredibilitas media/penerbit dan hubungannya dengan topik penelitian.
3. Melakukan analisis dari data yang sudah diperoleh dan hasil pemikiran dari temuan dan deskripsi yang terkait untuk menjawab rumusan masalah dan membuat kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

BAB II

DETERMINED DEVELOPMENTAL ELITE & RELATIVE AUTONOMY of THE DEVELOPMENTAL STATE

Pada bab kedua ini akan dibahas mengenai siapa saja tokoh yang terlibat serta kebijakan apa saja yang dapat meningkatkan keberhasilan dari perkembangan industri otomotif mobil pedesaan. Tokoh-tokoh yang terlibat tidak hanya pemerintah sebagai pembuat kebijakan namun terdapat beberapa lapisan sipil seperti perusahaan swasta, organisasi, serta masyarakat yang akan saling terintegrasi dalam melancarkan industri ini.

2.1 *Determined Developmental Elite*

Determined Developmental Elite merupakan indikator yang melihat siapa saja yang akan terlibat dalam pengembangan sektor industri otomotif mobil pedesaan ini. Seperti yang telah diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo memiliki peran yang penting dalam berjalannya industri ini serta Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perekonomian selaku lembaga yang berada dibawah pemerintah merupakan aktor yang cukup penting dalam pengembangan industri ini. Di masa pemerintahan Joko Widodo, pemerintah dalam hal ini kementerian-kementerian langsung di bawah Presiden seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan pihak lain seperti Gaikindo, IOI dan pihak swasta lainnya saling bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan dalam hal industri otomotif Indonesia. Sehingga program seperti mobil pedesaan yang telah dikembangkan oleh Kementrian Perindustrian dan

perusahaan swasta seperti PT. Astra Otoparts Tbk. dalam mengembangkan AMMDes bisa berjalan dengan lancar hingga saat ini.

a. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Sebagai kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo yang telah menjabat sejak tahun 2014 mendukung sektor industri otomotif seperti adanya pengembangan kendaraan pedesaan yang telah lama dicetuskan sejak pemerintah sebelumnya. Dukungan terus diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam membuat otomotif Indonesia terus berkembang dan dapat bersaing dalam dunia industri global. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sejarah Presiden Joko Widodo dalam menangani perkembangan mobil ESEMKA sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Solo. Salah satu contoh dukungan yang Presiden Joko Widodo berikan sewaktu menjabat sebagai Wali Kota Solo adalah dengan memakai kendaraan ESEMKA sebagai mobil dinas, hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa mobil ESEMKA dapat bersaing dengan mobil-mobil produksi negara lain (Raditya, 2019).

Presiden Joko Widodo juga mengikuti dan melihat perkembangan sektor otomotif Indonesia yang ditunjukkan pada ajang-ajang pameran otomotif seperti GIIAS dan juga IIMS. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan semangat para pelaku industri otomotif dalam negeri sekaligus sebagai upaya untuk memperkenalkan akan adanya kebijakan baru berupa pengembangan mobil pedesaan. Berbagai bentuk dukungan bagi para pemilik industri yang siap untuk terjun membantu kesuksesan mobil pedesaan ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo melalui kementerian-

kementerian di bawahnya. Dukungan tersebut dapat berupa pemberian insentif, keringanan pajak, hingga transfer teknologi guna percepatan produksi mobil pedesaan.

Pemberian dukungan yang telah disebutkan sebelumnya dimaksudkan untuk memberikan *support* para pelaku industri, dan kebijakan ini perlu didukung oleh semua pihak dan kementerian yang berada langsung di bawah Presiden. Harapannya agar kebijakan mobil pedesaan ini bisa berjalan sesuai harapan dan dengan berbagai proteksi yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga dapat membuat mobil pedesaan bisa bersaing dengan industri otomotif global.

b. Ruang lingkup di sekitar Presiden Joko Widodo

Perkembangan terkait berbagai sektor industri di Indonesia selain terdapat peran sentral Presiden Joko Widodo, juga tidak lepas dari pengaruh ruang lingkup yang terdapat di sekitar Presiden tersebut. Ruang lingkup ini dapat berisi pihak-pihak yang langsung berada di bawah otoritas Presiden seperti kementerian-kementerian, pihak-pihak non-negara seperti pihak swasta, pengusaha, tokoh-tokoh masyarakat hingga organisasi-organisasi yang juga memiliki peran dan pengaruh dalam perkembangan industri mobil pedesaan di Indonesia.

Ketertarikan Presiden Joko Widodo dalam indusri otomotif dapat ditarik mundur pada saat beliau menjabat sebagai Walikota Solo dengan memberikan dukungan pada produk otomotif bernama ESEMKA. Kemudian ketika menjabat Presiden, dukungan dari berbagai pihak serta

kekuatan dalam menentukan arah kebijakan negara membuat Presiden Joko Widodo melanjutkan ke arah industri mobil pedesaan.

- Kementrian Perindustrian Republik Indonesia

Kementrian Perindustrian selaku lembaga yang mengurusi kegiatan industri yang ada di Indonesia dan salah satu lembaga yang mengemukakan industri kendaraan pedesaan. Airlangga Hartarto sebagai salah seorang yang berada di lingkup Presiden Joko Widodo, merupakan orang yang menjabat Menteri Perindustrian dalam pemerintahan. Sebelumnya, Airlangga merupakan Ketua umum partai Golkar yang memiliki relasi kuat dengan partai pengusung Joko Widodo yaitu PDIP sehingga mendapat tempat dalam kementerian. Selain sebagai politisi, Airlangga juga memiliki sepak terjang sebagai pengusaha seperti menjadi Presiden Komisaris di PT. Fajar surya Wisesa, sehingga memiliki kemampuan dalam memanajemen kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan industri.

Kementerian Perindustrian di bawah arahan Airhangga Hartanto kemudian mengkoordinasikan kebijakan pengembangan industri otomotif mobil pedesaan kepada Kementrian Keuangan selaku lembaga yang mengurusi perihal perpajakan kepemilikan kendaraan bermotor. Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia juga berada di ruang lingkup pemerintahan dan memiliki andil dalam perkembangan perkembangan ekonomi Indonesia. Sri Mulyani memiliki sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala Bappenas dan Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menggantikan Dr. Boediono pada tahun 2008. Sebagai

orang yang berpengalaman dalam bidang perekonomian, keputusan-keputusan yang dibuat oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan di merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Perindustrian sehingga dapat membantu perkembangan industri otomotif mobil pedesaan.

- Perusahaan Otomotif Non-Pemerintah (PT. Astra Otoparts Tbk., PT. Kreasi Mandiri Wintor Indonesia)

PT. Astra Otoparts Tbk. adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi serta pendistribusi rangkaian produk komponen otomotif baik di Indonesia maupun mancanegara (Astra, -). Rini Soemarno sebagai mantan Dirut Astra yang sekarang menjabat sebagai menteri BUMN juga merupakan tokoh-tokoh yang berada di lingkup Presiden Joko Widodo yang memiliki pengalaman sebagai salah satu petinggi PT. Astra internasional Indonesia. Rini pernah membawa PT. Astra dari kerugian pada tahun 1988 menjadi mengalami keuntungan pada tahun 1989 dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diambilnya dalam upaya menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan. Saat ini PT. Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (PT. KMWI) yang merupakan anak dari perusahaan PT. Astra International Tbk. yang berfokus terhadap industri otomotif mobil pedesaan (Kreasi Mandiri Wintor Indonesia, -) juga turut melibatkan diri dalam pengembangan industri mobil pedesaan. Sehingga keterkaitan antara Rini Soemarno selaku Menteri BUMN dengan PT. KMWI dapat selaras dalam mendukung kebijakan pengembangan industri mobil pedesaan di Indonesia.

Perkembangan industri otomotif Indonesia tidak bisa dilepaskan dari berbagai kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh Presiden Joko Widodo serta tokoh-tokoh elit politik yang berada di sekitar ruang lingkup Presiden. Tokoh-tokoh elit politik ini didukung dengan latar belakang yang mumpuni dalam menangani hal-hal berkaitan dengan industri, sehingga diharapkan dapat memperkuat perkembangan industri otomotif mobil pedesaan berdasarkan kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan kedepannya. Selain itu, para tokoh tersebut merupakan tokoh yang memiliki keinginan untuk memajukan industri otomotif Indonesia karena mobil nasional merupakan hal yang diinginkan oleh para elit serta masyarakat Indonesia dengan melihat antusias dari para elit yang ikut dalam merumuskan kebijakan industri mobil pedesaan.

Sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Adrian Leftwich pada teori *Developmental States* yang dimana elit atau pemimpin harus memiliki ketertarikan terhadap kebijakan yang akan dibuat seperti contoh pada pembahasan ini yaitu industri mobil pedesaan, Presiden Joko Widodo beserta jajaran pemerintah telah memenuhi kriteria yang ada pada teori *Developmental States* karena Presiden Joko Widodo telah memiliki ketertarikan terhadap mobil nasional bahkan sejak sebelum menjabat sebagai Presiden Indonesia. Selain Presiden Joko Widodo, Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian pada saat itu merupakan salah satu yang mengemukakan bahwa mobil pedesaan adalah kesempatan bagi Indonesia apabila ingin menjadi negara yang memiliki persaingan di dunia industri otomotif (Leftwich, 1995).

2.2 Relative Autonomy of The Developmental State

Masing-masing pemerintahan beserta jajaran elit tiap negara memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan terkait industri, namun kewenangan tersebut bersifat relatif dan seringkali memiliki batasan. Kewenangan dan batasan ini terkait erat dengan tingkatan jabatan dalam pemerintahan, secara nasional yang dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan tersebut. Peran pemerintah melingkupi peraturan administratif, subsidi, proteksi, hingga peninjauan pasar, dan Negara secara langsung terlibat dalam pembangunan ekonomi dan memiliki pengaruh yang besar dalam kebijakan ekonomi publik. Pasar diatur melalui instrumen kebijakan yang dibuat oleh elite ekonomi dan birokrat yang merumuskan kebijakan dalam sektor manufaktur yang terkenal dengan tingkat produktivitas yang tinggi (Kasahara, 2013, pp. 4-5).

Selain itu pemberian proteksi berupa pemberian insentif pajak, penunjukkan langsung IKM-IKM daerah sebagai basis produksi dan penunjukkan perusahaan Krakatau Steel sebagai pemasok bahan baku baja, menunjukkan pentingnya arahan dan penekanan dari Pemerintah kepada setiap aktor yang terlibat dalam kebijakan mobil pedesaan. Namun, di karenakan perekonomian Indonesia yang sudah terintegrasi dengan perdagangan liberal dunia global, sehingga sudah tidak memungkinkan kembali bagi Indonesia untuk memberikan proteksi industri secara penuh. Sehingga *Developmental State* mengharapkan Negara menyesuaikan keadaan perdagangan internasional tersebut dan terus memfasilitasi proses restruksturisasi mobil pedesaan ini sehingga lebih efisien dan meningkatkan penekanan dengan cara lain seperti insentif, pengurangan pajak, dan penunjukkan produsen dalam negeri.

Hal ini juga berlaku bagi para aktor non-pemerintah yang juga diintervensi atau dilibatkan dalam kebijakan pengembangan industri sektor mobil pedesaan ini. Aktor non-negara ini berperan untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh Pemerintah yang dicetuskan dalam bentuk kebijakan resmi untuk mengembangkan industri otomotif mobil pedesaan.

a. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia memprogramkan mobil pedesaan sebagai kebijakan bagi perkembangan industri sektor otomotif nasional sekaligus secara resmi memperkenalkan kendaraan pedesaan ini (Stephanie, 2018). Presiden memiliki kemampuan untuk membuat fokus perencanaan pembangunan nasional kedepannya, dengan tujuan untuk memajukan industri mobil pedesaan. Presiden Joko Widodo juga dapat menyatakan untuk mengawal kebijakan industri mobil pedesaan sehingga menjadi sektor yang strategis.

Dapat dilihat bahwa Presiden Joko Widodo selaku pimpinan tertinggi eksekutif negara memiliki otoritas dalam menentukan industri apa saja yang menjadi prioritas untuk dijalankan, memberikan kebijakan-kebijakan sekunder yang dimaksudkan untuk melindungi dan mendukung kebijakan industri mobil pedesaan (contoh: Kebijakan proteksi industri seperti pemberian subsidi, dll), menunjuk kementerian-kementerian di bawah pemerintahannya untuk menjalankan kebijakan mobil pedesaan ini, hingga memperkenalkan industri baru ini kepada masyarakat untuk mendapat dukungan.

b. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian memiliki otoritas dalam mengarahkan industri sumber daya terkait di dalam negeri sesuai dengan instruksi Presiden untuk mengembangkan industri otomotif mobil pedesaan. Kebijakan yang diambil Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian Indonesia seperti menggulirkan berbagai program pendidikan dan pelatihan vokasi menuju era industri 4.0, dengan tujuan meningkatkan SDM di politeknik-politeknik (Politeknik Logam Morowali, Politeknik Kayu dan Pengolahan Kayu Kendal, Politeknik Industri Petrokimia Cilegon, dan lainnya) dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga ahli industri mobil pedesaan (Kemenperin, 2018).

Kemenperin juga menunjuk dan menyiapkan PT. Krakatau Steel selaku penyedia bahan baku baja untuk mensuplai kebutuhan industri otomotif mobil pedesaan (Jati, 2016). Kemenperin juga bekerja sama dengan Kemenperin dalam mencetuskan kebijakan Insentif fiskal dan non-fiskal bagi produsen yang memproduksi dan merakit kendaraan pedesaan kepada menteri Keuangan (Purnama R. , 2017).

Kemenperin juga memiliki kewenangan menunjuk langsung IOI selaku koordinator dalam memproses purwarupa kendaraan yang akan diproduksi oleh industri, kewenangan untuk memilih pelaku industri otomotif dalam negeri yang akan melakukan pengembangan produk (Kemenperin, 2017).

Otoritas untuk menunjuk tiap-tiap elemen pemasok bahan baku, pengembang, hingga tercapainya produksi mobil pedesaan ini adalah wewenang dari Kemenperin.

Kemenperin juga melakukan koordinasi dengan Kementrian Keuangan dalam menyusun peraturan kementrian terkait pemberian insentif agar dapat menarik minat produsen dalam negeri berlomba-lomba memproduksi industri mobil pedesaan, dan memberikan pajak yang rendah berdasarkan bagi masyarakat yang membeli dan menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh industri mobil pedesaan tersebut (Kemenperin, 2018). Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mewacanakan kebijakan peniadaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bagi hasil produksi industri mobil pedesaan dalam negeri. Dengan menghilangkan PPnBM pada penjualan mobil pedesaan, diharapkan harga mobil dapat lebih murah sehingga terjangkau bagi masyarakat desa yang membutuhkan mobil pedesaan dalam mengerjakan pekerjaanya (Sudarsono, 2018).

Melihat dari kedua poin di atas, dapat diketahui siapa-siapa saja pihak yang terlibat dalam mengembangkan industri otomotif mobil pedesaan di masa Presiden Joko Widodo ini. Selain dari pihak Pemerintah selaku pihak eksekutif negara, aktor-aktor lain di luar pemerintahan juga turut dilibatkan dalam pengembangan industri ini. Pemerintah selaku pembuat kebijakan, berupaya mengeluarkan keputusan untuk mendukung pengembangan industri ini dengan memanfaatkan seluruh elemen-elemen yang terdapat di dalam industri otomotif dalam negeri. Pihak-pihak non-negara seperti lembaga riset IOI yang merupakan bagian dari Kementerian Perindustrian yang bertugas untuk meriset dan mengawasi berjalannya industri otomotif nasional diarahkan oleh Pemerintah demi tercapainya tujuan nasional. Batasan dan wewenang dari Presiden Joko

Widodo dan Menteri Perindustrian telah sesuai dengan indikator *Relative Autonomy of The Developmental State* yang terdapat dalam teori *Developmental States,* yang menjelaskan bahwa negara harus mengesampingkan keinginan beberapa pihak yang sekiranya tidak diuntungkan agar dapat mencapai tujuannya yang sesuai dengan kebijakan yang ingin diterapkan terkait kebijakan industri mobil pedesaan (Leftwich, 1995).

BAB III

A POWERFUL, COMPETENT AND INSULATED ECONOMIC BUREAUCRACY & DEVELOPMENTAL STATES AND CIVIL SOCIETY

Adanya Kementerian Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah dapat memberikan jaminan serta perlindungan bagi sektor industri termasuk di dalamnya sektor industri otomotif. Sektor industri otomotif yang telah memiliki dukungan dari kementerian-kementerian ini tentu akan mendorong berjalan lancarnya sektor tersebut sehingga diharapkan dapat membantu perekonomian negara Indonesia. Hal ini mengingat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bawah Presiden yang dimaksudkan untuk tujuan nasional, tentunya juga harus mendapat dari berbagai kalangan terutama dari elemen pemerintah itu sendiri.

3.1 *A Powerful, Competent and Insulated Economic Bureaucracy*

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo setelah memutuskan untuk menjalankan kebijakan terkait pengembangan sektor industri otomotif mobil pedesaan, kemudian menunjuk badan-badan yang mengatur terkait birokrasi seperti:

A. Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian merupakan badan yang berada di bawah arahan Presiden Joko Widodo dalam menjadi pelaksana kebijakan industri yang ada di Indonesia. Kemenperin juga bertugas membantu pemerintah dalam mengelola aset dan kekayaan milik negara, menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dan

mengawasi agar kegiatan tersebut berjalan dengan semestinya. Terdapat lima sektor industri dari berbagai industri yang terdapat di bawah kemenperin, lima industri ini memberikan kontribusi besar bagi PDB negara. Lima industri tersebut adalah industri sektor makanan dan minuman, sektor testil dan pakaian, sektor elektronik, industri kimia dan juga sektor industri otomotif (Kemenperin, 2016). Kebijakan industri otomotif mobil pedesaan termasuk di dalam sektor industri otomotif nasional.

Kementerian Perindustrian pada industri otomotif mobil pedesaan memberikan dukungan kepada pihak-pihak terkait melalui kebijakan-kebijakan seperti program pendidikan dan pelatihan vokasi menuju era industri 4.0. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan SDM di politeknik-politeknik yang ditunjuk oleh Kemenperin untuk bisa mempersiapkan tenaga ahli industri mobil pedesaan. Pelatihan-pelatihan ini melibatkan politeknik sebagai institusi pendidikan, siswa-siswi yang menerima pelatihan sebagai sumber SDM masa depan bagi industri otomotif mobil pedesaan dan Kemenperin sebagai pengambil kebijakan sekaligus pengawas berjalannya pelatihan ini.

Kebijakan kedua yaitu Kemenperin menunjuk dan menyiapkan perusahaan-perusahaan yang bertugas untuk mengakomodasi bahan baku produksi untuk mensuplai kebutuhan industri otomotif mobil pedesaan. Perusahaan yang ditunjuk adalah PT. Krakatau Steel untuk menyediakan sekaligus mensuplai bahan baku baja kepada industri-industri produksi (Jati, 2016). Penunjukan PT. Krakatau Steel sekaligus dapat mendukung kebijakan pemerintah lain seperti penggunaan komponen lokal dalam industri yang ada di dalam negeri.

Kebijakan ketiga yaitu Kemenperin dalam upaya implementasi kebijakan industri otomotif mobil pedesaan bakal menggandeng sentra-sentra IKM (Industri Kecil Menengah) komponen otomotif yang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia seperti Tegal 50 IKM, Klaten 10 IKM, Purbalingga 138 IKM, Sidoarjo 134 IKM, Juwana 30 IKM, Pasuruan 49 IKM, Sukabumi 20 IKM dan Bandung 15 IKM. Selain itu, Kemenperin juga berupaya menggandeng 250 IKM Karoseri yang terdapat di beberapa wilayah seperti Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Utara. Ditambah dengan menggandeng 600 IKM terkait alat dan mesin pertanian yang terdapat di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Citizendaily, 2017). Tindakan ini diambil untuk selain menjamin berjalannya industri otomotif mobil pedesaan, juga sekaligus mensejahterakan berbagai Industri Kecil Menengah dalam negeri yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Kemenperin dengan wewenangnya juga melakukan penunjukan secara langsung terhadap IOI selaku koordinator dalam melakukan pengembangan dan memproses purwarupa kendaraan yang akan diproduksi oleh industri. Institut Otomotif Indonesia atau IOI merupakan lembaga riset yang bergerak dalam bidang pengembangan otomotif yang terdapat di Indonesia dengan memberikan pelatihan dan memberikan sertifikasi khusus untuk industri otomotif nasional (Bagja, 2016). I Made Dana Tangkas selaku pemimpin dalam IOI merupakan Direktur dari PT. Toyota Manufacturing Indonesia. I Made yang ditunjuk sebagai Presiden IOI oleh Kemenperin memiliki kecakapan dalam hal industri manufaktur otomotif dan juga termasuk tokoh yang berada di lingkup Presiden Joko Widodo.

Kewenangan ini agar IOI dapat memenuhi keinginan agar mobil pedesaan yang diproduksi dapat bersifat multi fungsi dan terintegrasi dalam produksi baik di pusat hingga daerah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di pedesaan (Nayazri, 2016). I Made Dana Tangkas selaku pemimpin dalam IOI yang ditunjuk oleh Kemenperin bertugas menjalankan fungsi organisasinya untuk melakukan *think tank* dalam menganalisis pengembangan sumber daya manusia dan membangun lingkungan yang mendukung tumbuhnya industri otomotif mobil pedesaan yang terdapat di Indonesia.

Keseriusan IOI dalam menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah diperlihatkan melalui aktivasi perwakilan khusus di Kantor Pusat Kemenperin di Jakarta Selatan. IOI juga meningkatkan daya saing tenaga kerja lewat skema vokasi antara pelaku industri dan dunia pendidikan. Selain itu, juga berupaya terus mengembangkan kemampuan industri kecil dan menengah dan para pemasok komponen lokal di sektor otomotif. IOI melakukan semua dengan fokus tujuan untuk mendorong dan menjadikan Indonesia sebagai basis utama produksi di Asia Tenggara (Motoris, 2018).

Kewenangan lain juga terkait dalam memilih siapa-siapa saja pelaku industri otomotif dalam negeri yang akan melakukan pengembangan produk (Kemenperin, 2017). Kementerian Perindustrian di bawah kepemimpinan Airlangga memberikan komitmen untuk mengembangkan industri mobil pedesaan sehingga kedepannya siap untuk berkompetisi dalam pasar global.

B. Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan merupakan badan yang yang bertugas dalam membantu berjalannya kebijakan industri mobil pedesaan melalui sektor ekonomi dan pajak. Kemenkeu berupaya mengeluarkan peraturan kementerian terkait pemberian intensif agar dapat menarik minat produsen dalam negeri untuk berlomba-lomba memproduksi mobil pedesaan. Pemberian Insentif ini merupakan kebijakan langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada para pelaku industri. Beberapa insentif itu antara lain insentif bea masuk, insentif pembebasan dan pengurangan pajak (Kemenkeu, 2019).

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mewacanakan memberikan pajak yang rendah bagi masyarakat yang membeli dan menggunakan produk-produk yang dihasilkan oleh industri mobil pedesaan tersebut. Hal ini sebagai bentuk dukungan dari Kemenkeu terhadap sektor industri mobil otomotif, karena industri ini bersifat potensial dan perlu terus didorong dan dikembangkan oleh pemerintah.

Dirjen Pajak yang berada di bawah arahan Sri Mulyani juga mewacanakan mengeluarkan kebijakan peniadaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) bagi hasil produksi industri mobil pedesaan dalam negeri. Diharapkan penghilangan PPnBM ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli mobil pedesaan karena harga yang terjangkau. Selain itu Kemenkeu juga melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan agar turut membantu pengembangan inovasi (Kemenperin, 2018). Kemenkeu di bawah arahan Sri Mulyani memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan fiskal untuk memastikan program yang diterapkan dapat menarik masyarakat untuk membeli hasil karya industri ini.

Terkait dengan penghilangan PPnBM, maupun subsidi dalam proses pengembangan industri mobil pedesaan. Sebenarnya hal ini dapat dianggap sebagai sebuah upaya proteksi dari pemerintah terhadap industri dalam negeri, yang dimaksudkan agar dapat bersaing dengan industri otomotif global. Industri otomotif mobil pedesaan ini ibarat bayi yang diberikan kemudahan oleh pemerintah selaku orangtua untuk mendapatkan akses-akses makan dan minum tanpa harus berjuang seperti yang dilakukan oleh industri global pada saat datang dan bersaing ke Indonesia. Sehingga pada saat kedepannya nanti akan dilepas bersaing, saat dirasa industri mobil pedesaan ini sudah mampu bersaing dalam skala global. Meskipun kebijakan akan penghilangan PPnBM dan subsisdi dapat membantu memajukan industri otomotif nasional agar dapat berjalan, namun hingga saat ini masih belum ada penghilangan PPnBM dan juga subsidi yang diwacanakan oleh pemerintah terkait mobil pedesaan.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang dilibatkan terkait pengembangan mobil pedesaan itu sesuai dengan tujuan awal Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar industri mobil pedesaan bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang kepada masyarakat dan negara dan mampu bersaing dalam industri otomotif global. Keputusan dan kebijakan hasil dari interaksi masing-masing aktor elit yang telah disebutkan dimaksudkan untuk memberikan keuntungan ekonomi dari produksi mobil pedesaan. Hal tersebut sesuai dengan poin *A Powerful, Competent, and Insulated Economic Bureaucracy* yang dikemukakan oleh Adrian Leftwich pada teorinya (Leftwich, 1995).

3.2 *Developmental States and Civil Society*

Dalam pembuatan kebijakan terkait pengembangan sektor industri otomotif mobil pedesaan di bawah arahan Presiden Joko Widodo, tidak dilakukan berdasarkan aspirasi masyarakat yang secara langsung disampaikan kepada pemerintah. Namun, kebijakan ini diambil setelah melihat bahwa dalam menghadapi persaingan industri global dalam hal mobil nasional, Indonesia cukup tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Amerika, Jepang dan Eropa. Mau tidak mau pemerintah harus memikirkan langkah lanjutan untuk mengamankan keberlangsungan industri otomotif dalam negeri dan pilihan akhirnya jatuh pada pengembangan industri mobil pedesaan. Keputusan untuk mengembangkan industri mobil pedesaan selain sebagai upaya untuk merebut pangsa pasar global dalam hal kendaraan pedesaan, juga dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan seperti bertani, berladang, dan kegiatan lain yang terkait dengan penghasilan masyarakat.

Aktor non-negara lain yang turut dilibatkan oleh pemerintah dalam menjalankan kebijakan pengembangan industri mobil pedesaan adalah GAIKINDO (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia). GAIKINDO adalah organisasi nirlaba yang beranggotakan perusahaan agen pemilik merk atau APM produsen kendaraan bermotor, distributor kendaraan bermotor, dan juga produsen komponen utama kendaraan bermotor (GAIKINDO, -). Yohannes Nangoi selaku ketua umum dari GAIKINDO sebelumnya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT. Isuzu Astra Motor (IAM).

GAIKINDO berperan membantu pemasaran dari produk mobil pedesaan dengan cara memberikan kesempatan bagi produsen-produsen mobil pedesaan

untuk dapat tampil pada acara tahunan GAIKINDO yaitu GIIAS (*GAIKINDO Indonesia International Auto Show*) yang di adakan pada tiap tahunnya. GIIAS adalah pameran otomotif bertaraf internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai produsen maupun konsumen dari seluruh dunia yang dimana hal tersebut dapat memberikan dampak yang besar terhadap produsen otomotif lokal dalam memasarkan produknya ke mancanegara (Indonesia Auto Show, 2015).

(Source: Liputan 6)

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mobil pedesaan juga mengutamakan bekerja sama dengan para pihak swasta seperti penggiat industri otomotif GAIKINDO maupun Institut Otomotif Indonesia yang berada di bawah kemenperin. Pemerintah membuat kebijakan tidak langsung melibatkan masyarakat umum namun lebih kepada para pelaku industri otomotif yang ada di Indonesia seperti Astra, IOI, dan GAIKINDO. Meskipun GAIKINDO membantu dalam memasarkan AMMDes melalui GIIAS, tidak ada dorongan aspirasi yang besar terhadap industri mobil pedesaan ini dan tindakan GAIKINDO ini hanya sebatas pada bentuk dukungan secara tidak langsung.

Selama ini kebijakan yang telah dibuat selalu berpusat kepada pemerintah, meskipun ada beberapa kebijakan yang didiskusikan bersama dengan pihak-pihak non-pemerintah yang berpengaruh pada kebijakan tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya saja dengan melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan yang nanti akan berpusat dan dikhususkan untuk masyarakat pedesaan, petani, serta penggiat UMKM.

Karena bagaimanapun juga sumber daya untuk bisa melakukan riset dan penelitian serta pengembangan terkait industri dalam suatu negara, keputusannya berada di tangan pemerintah negara tersebut. Pihak-pihak non-negara dapat terlibat sepanjang diizinkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini masyarakat dapat memberikan aspirasi terkait kebijakan tersebut namun tetap keputusan akhir berada di tangan pemerintah. Sebagai penjelasan dalam hal ini, kebijakan pengembangan industri mobil pedesaan telah disepakati oleh pemerintah dan para kementerian-kementerian terkait baru kemudian pihak-pihak seperti GAIKINDO dan IOI dilibatkan dalam proses kedepannya. Hal ini sesuai dengan indikator dari *Developmental State* terkait *Developmental State and Civil Society*, bahwa kebijakan yang diambil pemerintah lebih bersifat *top to down*, dimana masyarakat bukan pihak yang menjadi pendorong adanya kebijakan ini.

Meskipun pemerintah yang selama ini dalam membangun industri otomotif lebih berfokus kepada kebutuhan industri otomotif dan tidak terlalu fokus terhadap kebutuhan masyarakat, namun khusus untuk industri mobil pedesaan pemerintah terlihat berupaya memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dalam pengerjaan industri mobil pedesaan karena mobil pedesaan dapat diubah fungsinya sesuai dengan

kebutuhan masyarakat seperti menggiling padi maupun mesin pompa untuk irigasi (Handoko, 2018). Melihat dari apa yang hanya difokuskan pemerintah, pemerintah lebih mementingkan kebutuhan industri otomotif demi kepentingan nasional tanpa melibatkan dorongan aspirasi masyarakat secara luas, hal ini termasuk dengan apa yang dipaparkan Adrian Leftwich yang menganggap bahwa sudah seharusnya pemerintah memulai suatu kebijakan demi kepentingan nasional (Leftwich, 1995).

Namun, saat ini ditemukan bahwa tidak ada langkah lebih lanjut untuk mengembangkan sektor industri mobil pedesaan ini. Pemerintah terlihat tidak fokus, hal ini terkait tidak ada kebijakan lanjutan mengenai insentif-insentif untuk industri kecil menengah yang bergerak dalam industri mobil pedesaan, yang ada hanya kebijakan insentif bagi keseluruhan industri otomotif di Indonesia. IKM-IKM juga tidak secara langsung dilibatkan dalam perumusan kebijakan mengenai industri mobil pedesaan, akan tetapi Pemerintah malah mengajak aktor swasta yang lebih besar yang tergabung dalam GAIKINDO.

BAB IV

THE EFFECTIVE MANAGEMENT OF NON-STATE ECONOMIC INTEREST & REPRESSION, LEGITIMACY AND PERFORMANCE

Berdasarkan arahan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, maka adanya kegiatan aktor-aktor non negara yang memberikan dorongan pada sisi lain dimaksudkan agar industri otomotif mobil pedesaan dapat lebih tertata dan terjadi peningkatan dalam hal teknologi dan ekonomi.

Pemerintah yang menjadi kekuatan utama dalam pengambilan kebijakan juga memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan mengatur agar aktor-aktor non negara lain yang terlibat dalam pengembangan industri mobil pedesaan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh Presiden. Dengan kata lain pemerintah memaksa untuk menyelaraskan kepentingan aktor non negara tersebut dengan kebijakan industri otomotif mobil pedesaan. Dalam hal ini, upaya-upaya yang dijelaskan pada point dibawah menunjukkan upaya yang pemerintah lakukan sesuai dengan yang Leftwitch kemukakan berdasarkan indikator-indikator *Developmental State.*

4.1 *The Effective Management of Non-State Economic Interest*

Di dalam strategi *Developmental State* terdapat upaya penekanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi dari aktor-aktor non-negara. Tekanan ini bisa berupa kebijakan-kebijakan yang malah dianggap merugikan kepentingan ekonomi aktor non-negara, namun di jangka panjang mampu memberikan keuntungan bagi pengembangan domestik sektor ekonomi yang didorong pemerintah. Hal ini juga akan dilihat apa saja

kebijakan pemerintah Indonesia yang menekan aktor-aktor non-negara namun berguna untuk perkembangan dari industri mobil pedesaan tersebut.

A. Upaya peningkatan TKDN melalui IKM-IKM di daerah

Kebijakan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian yang merekrut IKM-IKM yang ada di daerah seperti yang telah disebutkan pada bab 2, dirasa mampu untuk dapat meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN dalam produksi mobil pedesaan. Hal ini mengingat IKM-IKM yang ada bertugas dalam memasok komponen-komponen yang nantinya akan dirakit menjadi mobil pedesaan.

Kebijakan peningkatan TKDN dirasa sinergis dengan kebijakan transfer teknologi, karena jika produksi mobil pedesaan hanya sebatas pada perakitan, maka perkembangan pesat pada komponen dalam negeri tidak akan tercapai. Pemerintah memiliki tujuan agar peningkatan TKDN yang terdapat dalam mobil pedesaan bisa mencapai minimal 70% bahkan lebih dari sebuah unit mobil pedesaan yang diproduksi (Purnama R. , 2018). Karena dengan meningkatkan TKDN akan membuka peluang kepada pabrik baru ataupun IKM yang ditunjuk untuk pembuatan suatu suku cadang maupun bagian dari kendaraan tersebut akan membawa teknologi yang belum ada di Indonesia sehingga menciptakan upaya transfer teknologi kepada industri kecil menengah yang nantinya akan menangani pembuatan bagian maupun suku cadang dari kendaraan tersebut.

B. Upaya Transfer teknologi kepada Industri Kecil Menengah

Dengan peningkatan TKDN yang terjadi, transfer teknologi secara tidak langsung akan terwujud karena bagian yang sebelumnya diimpor akan diproduksi di Indonesia dan tentunya saja akan terjadi transfer teknologi karena pabrik yang ditunjuk sebagai pembuat bagian tersebut akan mampu untuk menciptakan bagian yang sebelumnya diimpor. Selain dengan menciptakan produk yang sebelumnya diimpor, karyawan dari pabrik tersebut akan mengalami peningkatan kemampuan dalam manufaktur mobil pedesaan. Transfer teknologi merupakan upaya untuk mentransfer perkembangan teknologi dari suatu unit yang lebih tinggi kepada unit yang lebih rendah dalam hal teknologi. Terkait dalam hal transfer teknologi, WTO telah memberikan ketentuan mengenai kerjasama ekonomi dalam berbagai macam kegiatan melalui perjanjian yang disepakati dalam TRIPs (*Trade Related Intelektual Property Rights).* Dimana dalam TRIPs ini ada penerapan terkait mengatur hak kekayaan intelektual, sedangkan pada TRIPs pasal 7 dan Pasal 8 menjelaskan terkait komponen yang juga penting dalam kerja sama ekonomi adalah adanya upaya transfer teknologi. Transfer teknologi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan perlindungan atas kesejahteraan tersebut bagi masyarakat (Departemen Perindustrian, Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah, 2007, hal. 13-14).

Transfer teknologi menjadi sangat penting bagi pemerintah mengingat pentingnya peningkatan kemampuan untuk memproduksi dan menciptakan komponen-komponen dari mobil pedesaan yang dilakukan oleh Industri Kecil Menengah. Upaya transfer teknologi ini dilakukan secara mandiri oleh PT. Astra International Tbk. sebagai industri otomotif yang telah ada sejak lama dan memiliki teknologi yang mumpuni, sehingga PT. Astra International Tbk. melalui

PT. Kreasi Mandiri Wintor Indonesia sebagai anak perusahaannya ditunjuk sebagai salah satu produsen utama dari mobil pedesaan.

IKM-IKM yang terlibat dalam kebijakan industri mobil pedesaan melalui transfer teknologi ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam memproduksi komponen-komponen dari mobil pedesaan itu sendiri seperti kaca, knalpot, suku cadang dan komponen-komponen lainnya. Peningkatan kualitas produksi komponen-komponen ini pada akhirnya akan berimbas pada peningkatan kualitas dari mobil pedesaan sehingga diharapkan dapat bersaing dengan industri otomotif dalam dunia global.

4.2 *Repression, Legitimacy and Performance*

Pada poin ini untuk melihat bagaimana strategi *Developmental State* mengakui adanya kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintah di dalam mendorong pengembangan sektor perekonomian yang ingin ditingkatkan. Di dalam kebijakan represif ini, memang akan memberikan tekanan dan terkadang menimbulkan adanya tentangan dari masyarakat. Namun, fokus dari poin ini adalah bagaimana kebijakan represif tersebut pada perkembangannya mampu berjalan yang kemudian menunjukkan adanya legitimasi terkait kebijakan yang dipaksakan pemerintah. Selain itu, legitimasi lainnya adalah dengan semakin meningkatnya sektor perekonomian yang didorong oleh pemerintah.

- Wacana Penghilangan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM yang akan dihilangkan oleh pemerintah untuk industri mobil pedesaan dapat menekan harga penjualan mobil pedesaan agar dapat menarik minat masyarakat pedesaan agar memiliki ketertarikan untuk membeli produk mobil pedesaan ketimbang membeli produk dari merek dari negara lain yang

terkena PPnBM. Hal ini secara tidak langsung memaksa atau memberikan nilai tambah tersendiri agar masyarakat lebih memilih mobil pedesaan ketimbang mobil pengangkut dari merek luar negeri yang tentu saja terkena PPnBM. Kebijakan ini dapat dianggap sebuah kebijakan yang mengistimewakan produk industri mobil pedesaan dan industri-industri lainnya harus menerima hal tersebut, mengingat ini merupakan arahan langsung dari pemerintah untuk bisa membuat industri otomotif mobil pedesaan berkembang.

Selain dari hilangnya PPnBM untuk mobil pedesaan, masyarakat ditawarkan dengan spesifikasi mobil yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan yang memiliki pekerjaan seperti petani maupun pedagang. Hal tersebut menjadi daya tarik yang lainnya dari mobil pedesaan ini. Namun, rencana akan penghilangan PPnBM belum dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini untuk dapat menunjang berjalannya industri mobil pedesaan sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa Kementerian Keuangan belum fokus dalam membantu perkembangan sektor industri mobil pedesaan melalui kebijakannya.

- Penunjukan langsung PT. Krakatau Steel sebagai pemasok bahan dasar Mobil Pedesaan

PT. Krakatau Steel sebagai salah satu perusahaan nasional yang memproduksi baja di Indonesia, mendapat penunjukan langsung dari Kementerian Perindustrian sebagai pemasok bahan baku utama dalam proses produksi mobil pedesaan. Penunjukan ini merupakan upaya memaksa dari Pemerintah untuk menetapkan pemasok bahan baku produksi. Pada kondisi yang biasa, penentuan pemasok dari suatu proyek atau produksi yang berasal dari pemerintah, biasanya

dilakukan melalui proses yang bernama tender. Tender sendiri dapat di artikan sebagai lelang atau sistem jual beli yang dilakukan oleh suatu pihak dengan cara mengundang vendor (penjual atau penyedia) untuk mempresentasikan harga dan kualitas, kemudian keputusan siapa pemenang proyek tersebut diumumkan dalam tender sehingga diharapkan mencapai transparansi yang baik (Herdiyanti, 2018).

Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar pengembangan industri otomotif mobil pedesaan ini dilakukan oleh industri dalam negeri dan masyarakat, maka penunjukan langsung pemasok bahan baku produksi yaitu PT. Krakatau Steel dapat dianggap sebagai sebuah kebijakan yang represif yang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan sektor perekonomian ini. Kebijakan ini sejatinya bukan hanya untuk mobil pedesaan, namun untuk semua industri otomotif di Indonesia termasuk manufaktur besar. Sehingga kebijakan represif ini pada dasarnya tidak memberikan insentif daya saing atau keistimewaan yang cukup baik bagi mobil pedesaan.

- Wacana Penunjukan IKM-IKM sebagai pemasok komponen-komponen Mobil Pedesaan

Wacana penunjukan IKM-IKM di daerah sebagai pemasok komponen-komponen mobil pedesaan merupakan kebijakan Kementerian Perindustrian dengan maksud selain membantu proses produksi mobil pedesaan, juga untuk memajukan Industri Kecil Menengah masyarakat Indonesia. Masalah terkait kurangnya kualitas produksi komponen IKM dibanding produsen lain yang berasal dari industri asing yang berspesialisasi pada pembuatan komponen mobil, dapat diatasi dengan adanya upaya transfer teknologi dari PT. Astra International

dan bantuan riset dan penelitian dari IOI sehingga kedepannya kualitas komponen-komponen dari IKM tersebut dapat bersaing dengan produsen komponen mobil asing.

Wacana ini sejalan dengan kebijakan agar komponen-komponen dari mobil pedesaan sesuai dengan syarat TKDN yang akan ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan Kementerian Perindustrian terkait TKDN ini, dilaksanakan oleh PT.KMWI sebagai produsen dari AMMDes dengan cara langsung membangun komitmen kerja sama dengan lebih dari 70 industri komponen dalam negeri. Industri komponen dalam negeri ini merupakan IKM-IKM yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Untuk AMMDes dari PT.KMWI sendiri 70% komponennya saat ini sudah berasal dari IKM tersebut, dan kedepannya akan terus meningkat (Kemenperin, 2018). Pada indikator ini menunjukkan adanya bentuk upaya represi dari pemerintah Indonesia yang sesuai dengan indikator yang dijelaskan Leftwitch dalam teori *Developmental State*, namun untuk legitimasi dan performa masih belum ada. Hal ini juga terkait kebijakan penunjukan IKM masih belum berjalan hingga saat ini karena masih berupa wacana pemerintah dalam memajukan mobil pedesaan sehingga masih belum memberikan dampak yang berarti di lapangan pada saat ini sehingga membuat pihak swasta menginisiasi sendiri kerjasamanya dengan IKM-IKM.

Namun, ternyata hingga saat ini belum ada tindakan represif yang dilakukan oleh Pemerintah secara langsung untuk meningkatkan pertumbuhan industri otomotif mobil pedesaan. Dengan tidak adanya tindakan represif lanjutan atas wacana-wacana tersebut dari Pemerintah, berakibat pada tidak adanya performa dan legitimasi. Sehingga industri mobil pedesaan ini masih belum

menjadi ancaman bagi industri otomotif luar negeri. Pada dasarnya, segala sesuatu yang dirumuskan pemerintah sebagai pendukung industri mobil pedesaan hingga saat ini masih berupa sosialisasi dan wacana kebijakan saja. Sehingga daya represi yang dimiliki oleh Pemerintah masih belum ada dan berjalan dan hal ini membuat *performance* dari pemerintah terkait isu mobil pedesaan masih belum dapat dirasakan. Dapat dikatakan bahwa Indonesia atau pemerintah masih belum sesuai dengan kriteria yang dikemukakan oleh Adrian Leftwich karena belum adanya performa dan legitimasi dari kebijakan yang dikeluarkan untuk mendorong kemajuan industri mobil pedesaan (Leftwich, 1995).

BAB V

CONCLUSION

Keinginan Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki industri otomotif sendiri merupakan cita-cita Indonesia yang sangat diidamkan. Namun, Indonesia tidak dapat bersaing dengan produsen otomotif besar dunia yang telah berjalan dan bersaing di dunia otomotif internasional. Pencetusan pemerintah akan mobil pedesaan merupakan salah satu cara agar Indonesia dapat bersaing dengan produsen-produsen otomotif dunia dikarena mobil pedesaan dianggap sebagai mobil dengan spesifikasi yang baru dalam dunia otomotif serta sangat cocok dengan kondisi alam Indonesia.

Berdasarkan analisis penulis dengan menggunakan enam indikator dari konsep *developmental state* oleh Adrian Leftwich dalam menganalisis bagaimana dorongan kebijakan pemerintah dalam memberikan proteksi terhadap sektor industri mobil pedesaan dari kuatnya persaingan industri otomotif global pada masa Presiden Joko Widodo. Penulis mendapat temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

Pertama, terkait dengan indikator *determined developmental elite* yang melihat siapa saja aktor yang terlibat dalam pengembangan sektor industri otomotif mobil pedesaan. Aktor-aktor yang memiliki peran besar di dalam perumusan kebijakan ini antara lain Presiden Joko Widodo selaku Presiden Indonesia yang mendukung adanya mobil pedesaan, aktor selanjutnya yaitu Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian, kedua orang ini menjadi tokoh sentral dari perkembangan mobil pedesaan.

Kedua, terkait dengan faktor *relative autonomy of the developmental state* yang melihat kewenangan dan batasan dalam mengatur kebijakan terkait industri otomotif mobil pedesaan. Presiden Joko Widodo selaku pimpinan eksekutif memiliki otoritas untuk menentukan pengembangan industri yang dijadikan prioritas. Kementerian Perindustrian memiliki otoritas dalam mengarahkan sumber daya industri di dalam negeri untuk dialokasikan pada pengembangan sektor industri sesuai arahan Presiden seperti program pelatihan bagi SDM. Kementerian Keuangan yang berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan terkait pemberian insentif dan pajak yang rendah bagi produsen dan konsumen dari industri mobil pedesaan. Pemerintah dan elit-elitnya juga memiliki wewenang untuk memanfaatkan elemen-elemen yang terdapat dalam sektor industri termasuk pihak non-negara seperti IOI dan GAIKINDO.

Ketiga, terkait dengan faktor *a powerful, competent and insulated economic bureaucracy* yang melihat penunjukan badan-badan resmi yang mengatur birokrasi untuk membantu pengembangan kebijakan industri mobil pedesaan. Badan-badan yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo adalah Kementerian Perindustrian yang bertugas mengatur fokus industri nasional ke arah pengembangan mobil pedesaan, menentukan perusahaan-perusahaan yang mensuplai bahan baku mobil pedesaan tersebut yaitu PT.Krakatau Steel dan komponen-komponen dari para IKM yang digandeng oleh Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian juga menunjuk IOI selaku pihak yang bertugas dalam riset dan pengembangan purwarupa mobil pedesaan.

Kementerian Keuangan diberi tugas oleh Presiden Joko Widodo untuk membantu berjalannya kebijakan industri mobil pedesaan melalui sektor ekonomi dan pajak seperti pemberian insentif bagi produsen dan konsumen mobil pedesaan.

Faktor yang keempat yaitu *developmental states and civil society* yang melihat bahwa pembuatan kebijakan terkait pengembangan sektor industri otomotif mobil pedesaan tidak dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat namun lebih kepada NGO di Indonesia seperti GAIKINDO, IOI dan Astra. Kebijakan ini di ambil pemerintah setelah melihat gagalnya industri mobil nasional bersaing dengan industri mobil asing sehingga fokus kemudian dialihkan kepada mobil pedesaan yang memiliki potensi merebut pangsa pasar global sektor industri mobil pedesaan yang multiguna.

Faktor kelima yaitu terkait *the effective management of non-state economic interest,* yaitu mengenai adanya upaya penekanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi dari aktor-aktor non-negara namun dalam jangka panjang memberikan keuntungan bagi pengembangan domestik. Kebijakan seperti Upaya transfer teknologi kepada IKM dari Astra sebagai industri otomotif yang telah lama berkecimpung dalam dunia industri Indonesia. Kebijakan lainnya yaitu upaya peningkatan TKDN melalui IKM-IKM di daerah, hingga kebijakan bantuan RnD pemerintah melalui IOI dalam mendorong pengembangan industri mobil pedesaan.

Faktor terakhir yaitu *repression, legitimacy and performance* yang mengakui adanya kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintah dalam mendorong pengembangan sektor industri mobil pedesaan. Dalam riset ini ditemukan meski

beberapa kebijakan yang sudah direalisasi seperti penunjukan langsung tanpa tender PT. Krakatau Steel sebagai pemasok baja. Namun, beberapa kebijakan masih sebatas wacana, seperti wacana penghilangan PPnBM bagi konsumen mobil pedesaan dan wacana penunjukan IKM-IKM sebagai pemasok komponen-komponen mobil pedesaan.

Berikut merupakan tabel yang menunjukan sudah sampai mana pemerintah mampu memenuhi kriteria yang sesuai dengan indikator dari teori *Developmental State* yang dikemukakan oleh Adrian Leftwich.

Menurut Adrian Leftwich	Yang telah dilakukan Indonesia
Determined Developmental Elite yang dimana menjelaskan bahwa harus ada ketertarikan dari elit pemerintah terkait kebijakan pengembangan nasional.	Sudah sesuai dengan indikator pertama, karena Presiden Joko Widodo beserta Menteri Perindustrian telah memiliki ketertarikan akan mobil nasional.
Relative Autonomy of the Developmental State yang menjelaskan bahwa negara harus mengesampingkan keinginan beberapa pihak yang sekiranya tidak diuntungkan agar dapat mencapai tujuannya.	Sudah sesuai dengan indikator kedua, karena pemerintah memulai semuanya karena keinginan untuk mencapai kepentingan nasional dan mengesampingkan keinginan para pelaku industri-industri terkait otomotif diluar yang dilibatkan oleh pemerintah pada industri mobil pedesaan.

A Powerful, Competent, and Insulated Economic Bureaucracy yang menjelaskan bahwa dibutuhkan strategi yang matang apabila ingin mencapai keuntungan ekonomi dalam jangka panjang.	Sudah sesuai dengan indikator ketiga, karena wacana kebijakan yang diambil oleh pihak yang dilibatkan terkait pengembangan mobil pedesaan itu sesuai dengan tujuan awal Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar industri mobil pedesaan bisa memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka panjang kepada masyarakat dan negara
Developmental States and Civil Society yang seringkali kebijakan diambil bersifat *top-down* atau masyarakat tidak turut andil dalam perumusan kebijakan.	Sudah sesuai dengan indikator keempat yang dimana pemerintah mengambil kebijakan secara mandiri karena inisiatif untuk memajukan kepentingan nasional, bukan karena adanya dorongan atau keinginan yang langsung disampaikan dari masyarakat ke pemerintah.
The Effective Management of Non-State Economic Interest yang menjelaskan adanya upaya penekanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang tidak memperhatikan kepentingan ekonomi dari aktor-aktor non-negara.	Sudah sesuai dengan indikator kelima karena adanya penunjukan secara langsung IKM-IKM yang telah ditentukan oleh Kementerian Perindustrian yang akan melaksanakan pengembangan mobil pedesaan yang

	membuat beberapa IKM yang tidak terpilih tidak mendapat kesempatan tersebut.
Repression, Legitimacy, and Performance, yaitu mengakui adanya kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintah di dalam mendorong pengembangan sektor perekonomian yang ingin ditingkatkan, mampu berjalan dan menunjukkan legitimasi atas kebijakan yang dijalankan tersebut dan pada akhirnya memperlihatkan performa yang dapat dinilai baik secara kualitas dan kuantitas.	Tidak sesuai dengan indikator keenam karena belum adanya tindakan lebih lanjut dari pemerintah. Penulis menemukan bahwa pada indikator ini masih terbatas pada sikap represif saja yang tampak, namun belum ada tindakan lebih lanjut yang memperlihatkan legitimasi dan performa yang terlihat secara nyata atas kebijakan industri mobil pedesaan.

Dari temuan-temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama ini belum ada tindakan represif yang dilakukan pemerintah selain sebatas wacana. Terutama terkait kebijakan yang dikhususkan untuk pertumbuhan AMMDes, sehingga performa kebijakan dan legitimasinya masih dianggap nol atau tidak ada. Karena dapat disimpulkan pada saat ini, muncul dan berkembangnya mobil pedesaan di Indonesia itu lebih kepada dilakukan oleh perusahaan swasta secara mandiri, dan hal ini didorong oleh permintaan pasar bukan karena dorongan pemerintah melalui kebijakan represif.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, I. E. (2015, February 2). *Ini Kisah Mengenai Lahir dan Matinya Mobnas Timor*. Retrieved August 8, 2019, from Republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/15/02/09/nji0mq-ini-kisah-mengenai-lahir-dan-matinya-mobnas-timor

Citizendaily. (2017, December 17). *Menyemai harap di mobil pedesaan*. Retrieved from Citizendaily: https://www.citizendaily.net/menyemai-harap-di-mobil-pedesaan/

Deny, S. (2018, August 2). *Mobil Pedesaan Meluncur di GIIAS 2018*. Retrieved from Liputan 6: https://www.liputan6.com/bisnis/read/3607369/mobil-pedesaan-meluncur-di-giias-2018?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.liputan6.com%2Ftag%2Fmobil-pedesaan%3Fpage%3D2

Departemen Perindustrian, Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah. (2007). Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum. In *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Indikasi Geografis* (pp. 13-14). Jakarta: Departemen Perindustrian.

Eka S, I. M. (2018, May 12). *Jatuh Bangun Mahathir Kembangkan Industri Otomotif Proton*. Retrieved August 13, 2019, from cnnindonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180511210503-384-297566/jatuh-bangun-mahathir-kembangkan-industri-otomotif-proton

Gaikindo. (2018, January 1). *Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia*. Retrieved August 8, 2019, from gaikindo.or.id: https://www.gaikindo.or.id/perkembangan/

Handoko, K. (2018, August 2). *GIIAS 2018: Jokowi puji kendaraan pedesaan, ini spesifikasinya*. Retrieved from IDN Times: https://www.idntimes.com/automotive/car/kevin-handoko/giias-2018-jokowi-puji-kendaraan-pedesaan-ini-spesifikasinya/full

Haryono, W. (2014). Perkembangan Komponen Otomotif di Indonesia. *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Warta Ekspor*, 2-19.

Herdianto, E. F. (2016). Implementasi AEC dalam peningkatan jaringan produksi regional Asean: Studi kasus industri otomotif. *Dauliyah journal of islamic and international studies*, 95-113.

Herdiyanti, M. (2018, December 19). *Apa Itu Tender dan Bagaimana Cara Mengikutinya?* Retrieved from Eproc: https://www.eproc.id/berita/detail/apa-itu-tender-dan-bagaimana-cara-mengikutinya

Indonesia Auto Show. (2015, February 25). *GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) Mendapat Pengakuan dari OICA*. Retrieved from The 27th GAIKINDO Indonesia International Auto Show:

https://indonesiaautoshow.com/2015/02/25/gaikindo-indonesia-international-auto-show-giias-mendapat-pengakuan-dari-oica/

Jati, G. P. (2016, March 28). *Krakatau Steel Siap Pasok Separuh Kebutuhan Baja Otomotif*. Retrieved October 15, 2019, from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160328122354-92-120005/krakatau-steel-siap-pasok-separuh-kebutuhan-baja-otomotif

Kasahara, S. (2013). The Asian developmental state and the flying geese paradigm. *UNCTAD*, 1-36.

Kemenkeu. (2013). *Intensif Fiskal Untuk Meningkatkan Daya Saing Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat di Indonesia.* Retrieved August 8, 2019, from Kemenkeu.go.id: https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2013_kajian_pkpn_kajian_insentif%20fiskal%20industri%20otomotif.pdf

Kemenkeu. (2019, July 25). *Pemerintah akan berikan berikan sejumlah insentif apda para pelaku industri otomotif*. Retrieved from kementerian keuangan republik Indonesia: https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-akan-berikan-sejumlah-insentif-pada-para-pelaku-industri-otomotif/

Kemenperin. (2016, July 1). *Tugas pokok dan fungsi kementerian perindustrian*. Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: http://www.kemenperin.go.id/tugas-pokok-fungsi-kementerian-perindustrian

Kemenperin. (2017, February 3). *Kemenperin: Mobil Pedesaan Mudahkan Aktivitas 'Pak Tani'*. Retrieved October 15, 2019, from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: https://www.kemenperin.go.id/artikel/16957/Kemenperin:-Mobil-Pedesaan-Mudahkan-Aktivitas-%E2%80%98Pak-Tani%E2%80%99

Kemenperin. (2018). *Ekspor Komponen Otomotif Nasional Naik 13 Kali Lipat*. Retrieved October 15, 2019, from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: https://kemenperin.go.id/artikel/19108/Ekspor-Komponen-Otomotif-Nasional-Naik-13-Kali-Lipat

Kemenperin. (2018, August 2). *Karya Anak Bangsa, AMMDes Diproduksi Januari 2019 Hingga 15.000 Unit*. Retrieved from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: https://kemenperin.go.id/artikel/19531/Karya-Anak-Bangsa,-AMMDes-Diproduksi-Januari-2019-Hingga-15.000-Unit

Kemenperin. (2018). *Sudah Disetujui, Aturan 'Super Deductible Tax' Ditargetkan Terbit Bulan Mei*. Retrieved October 15, 2019, from Kementerian Perindustrian Republik Indonesia: https://kemenperin.go.id/artikel/19170/Sudah-Disetujui,-Aturan-%E2%80%98Super-Deductible-Tax%E2%80%99-Ditargetkan-Terbit-Bulan-Mei

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. (-, - -). *Kemenperin Rampungkan Konsep Mobil Pedesaan, Industri Dipacu Produksi*. Retrieved from Kementrian Perindustrian Republik Indonesia:

https://kemenperin.go.id/artikel/18096/Kemenperin-Rampungkan-Konsep-Mobil-Pedesaan,-Industri-Dipacu-Produksi

Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. (2016, November 30). *Wacana Mobil Pedesaan Kembali Mencuat*. Retrieved from Kementrian Perindustrian Republik Indonesia: https://kemenperin.go.id/artikel/16637/Wacana-Mobil-Pedesaan-Kembali-Mencuat

Kuswaraharja, D. (2015, April 13). *Ini Dia Mobil Maleo yang Hampir Jadi Mobnas di Era Soeharto*. Retrieved from detikoto: https://oto.detik.com/mobil/d-2885994/ini-dia-mobil-maleo-yang-hampir-jadi-mobnas-di-era-soeharto

Leftwich, A. (1995). Bringing politics back in: Towards a model of the. *The Journal of Development Studies*, 405-420.

Leftwich, A. (1995). Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state. *The Journal of Development Studies*, 408.

Leftwich, A. (1995). Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state. *The Journal of Development Studies*, 406.

Leftwich, A. (1995). Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state. *The Journal of Development Studies*, 411-412.

Leftwich, A. (1995). Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state. *The Journal of Development Studies*, 415.

Leftwich, A. (1995). Bringing politics back in: Towards a model of the developmental state. *The Journal of Development Studies*, 418-419.

Manurung, E. M. (2012). Industri Mobil Nasional : Perspektif Berlian Poster. *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi Unpar*, 66-76.

Mola, T. (2019, March 16). *Persaingan Pasar, Inilah Target Lima Merek Terlaris Mobil 2019*. Retrieved October 3, 2019, from Bisnis Otomotif: https://otomotif.bisnis.com/read/20190316/275/900482/persaingan-pasar-inilah-target-lima-merek-terlaris-mobil-2019

Motoris. (2018, March 29). *Astra nyodok proyek mobil pedesaan, apa kabar IOI?* Retrieved from motoris.id: https://www.motoris.id/news/7898/astra-nyodok-proyek-mobil-perdesaan-apa-kabar-ioi/

Nayazri, G. M. (2016, November 9). *Sudah sampai mana program mobil pedesaan?* Retrieved from Otomotif Kompas: https://otomotif.kompas.com/read/2016/11/09/090100315/sudah.sampai.mana.program.mobil.pedesaan.

Nayazri, G. M. (2016, November 9). *Sudah Sampai Mana Program Mobil Pedesaan?* Retrieved from Kompas.com: https://otomotif.kompas.com/read/2016/11/09/090100315/sudah.sampai.mana.program.mobil.pedesaan.

Purnama, R. (2017, February 28). *Syarat Bagi Produsen Otomotif Untuk Rakit Kendaraan Pedesaan* . Retrieved August 8, 2019, from cnn indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170227165644-384-196546/syarat-bagi-produsen-otomotif-untuk-rakit-kendaraan-pedesaan

Purnama, R. (2017, September 4). *Tawaran Insentif Setara LCGC Bagi Pengembang Mobil Pedesaan*. Retrieved October 14, 2019, from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170904140514-384-239294/tawaran-insentif-setara-lcgc-bagi-pengembang-mobil-pedesaan

Purnama, R. (2018, June 28). *Kantongi TKDN 70 Persen, Mobil Desa Unjuk Gigi di GIIAS 2018*. Retrieved from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180627193035-384-309572/kantongi-tkdn-70-persen-mobil-desa-unjuk-gigi-di-giias-2018

Raditya, I. N. (2019, September 7). *Sejarah Esemka: Ditunggangi Meski (Sempat) Ditinggalkan Jokowi*. Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/sejarah-esemka-ditunggangi-meski-sempat-ditinggalkan-jokowi-ehFp

Stephanie, C. (2018, August 2). *Jokowi Kenalkan Mobil Pedesaan dan Langsung Jajal di GIIAS*. Retrieved October 14, 2019, from CNN Indonesia: https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180802123101-384-318915/jokowi-kenalkan-mobil-pedesaan-dan-langsung-jajal-di-giias

Sudarsono. (2018, March 28). *Pemerintah Bebaskan Pajak Mobil Desa*. Retrieved from okefinance: https://economy.okezone.com/read/2018/03/28/20/1878975/pemerintah-bebaskan-pajak-mobil-desa

Suharto, T. (2002). Kebijakan ekonomi global di negara sedang berkembang: Tinjauan teori, problematika dan interaksi kebijakan perdagangan dan industrialisasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.3 no.1*, 91-110.

Susantono, B., & Berawi, M. A. (2012). PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI BERBASIS KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA DI INDONESIA. *Jurnal Transportasi Vol. 12 No. 2*, 93-100.